

## Dinsos Kabupaten Lebak Luncurkan Program Raket Tangani Kasus KDRT

**LEBAK (IM)-** Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak meluncurkan program Rumah Daring Keluarga Tercinta (Raket) untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Dalam program Raket ini terdapat nomor WhatsApp dan bisa dihubungi masyarakat terkait dengan kasus KDRT,” kata Kepala Dinsos Lebak, Eka Darmana Putra di Lebak, Banten, Kamis (13/10).

Program Raket bisa menyelesaikan masalah seperti apa bentuk KDRT, termasuk juga dampaknya. Hal itu agar kehidupan mereka bisa kembali rukun dan damai dalam membangun keluarga. “Kita jangan sampai hidup sudah tidak mampu, dalam rumah tangga juga terjadi keributan terus,” kata Eka.

Menurut dia, program Raket merupakan inovasi pemerintah daerah dengan didukung pekerja sosial yang profesional dan bisa menjangkau, memfasilitasi, mendamaikan, dan reunifikasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan rukun. Apabila pemicu KDRT itu akibat faktor ekonomi, sambung dia, tentu akan diajukan untuk mendapatkan bantuan sosial.

Bantuan bisa berupa, PKH, BPNT sembako, Kartu Sehat Indonesia (KIS) atau BPJS PBI, dan bantuan lainnya. “Kami siap mengajukan usulan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial,” kata Eka.

Dia menuturkan, penanganan program Raket bukan hanya mengenai kasus KDRT, juga korban media sosial melalui pemberitaan, kekerasan seksual kepada anak maupun korban pelecehan seksual. Bahkan, mendampingi para korban KDRT, mulai laporan ke kepolisian hingga sidang di pengadilan negeri.

Karena itu, permasalahan sosial di masyarakat menjadi salah satu yang ditangani Dinsos Kabupaten Lebak dalam program Raket, termasuk kenakalan remaja. Saat ini, kasus KDRT bisa diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Kasus KDRT bisa terjadi karena adanya kekerasan fisik, psikis juga penelantaran rumah tangga. KDRT masih terus terjadi hingga saat ini, tak hanya anak dan perempuan, kekerasan juga dialami oleh laki-laki. Beberapa faktor yang menjadi penyebab KDRT, di antaranya persoalan ekonomi, keluarga hingga perselingkuhan.

Kasus KDRT di Kabupaten Lebak cenderung meningkat pada 2022, meski jumlahnya tidak signifikan. “Kami berharap melalui inovasi Raket ini dapat meminimalisasi KDRT, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas,” ujar Eka tanpa memercini angkanya. ● pra

UNTUK SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK

### Pemkab Tangerang Tak Mau Bebani Orang Tua Penggunaan Pakaian Adat

**TANGERANG (IM)-** Pemkab Tangerang masih membahas penerapan kebijakan penggunaan pakaian adat untuk seragam sekolah bagi peserta didik SD-SMP di Kabupaten Tangerang. Mereka masih menggodok peraturan bupati (perbup) sebagai payung hukum penerapannya.

“Semua harus ada payung hukum. Di pusat (Kemendikbudristek) sudah ada, kami sedang berbicara dengan Dispora dan juga Bappeda dan insyaallah 2023 kita keluarkan aturan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Saifullah, Kamis (13/9).

Meski begitu, Perbup yang menjadi aturan turunan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu memerlukan waktu panjang untuk bisa ditetapkan.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga tidak ingin aturan tersebut membebani masyarakat, karena harus membeli atau menyewa pakaian adat untuk kegiatan sekolah putranya.

“Tapi kan kalau kita keluarkan aturan prosesnya bertahap kali. Karena kan proses pengadaan jangan sampai memberatkan masyarakat, nanti bupati diemeli gara-gara Perbup. Pakai pakaian adat siswa kudu beli deui. Itu menjadi kajian kita ke depan,” terang dia.

Sebelum penetapan Perbup tersebut, Saifullah menyatakan perlunya kajian jenis pakaian adat yang akan digunakan para siswa SD-SMP di Kabupaten Tangerang nantinya. Sebab, dengan pakaian adat model pangsi saat ini, apakah layak digunakan siswa bersekolah.

“Kalau secara umum ungu-ungu, tapi itu harus dikaji yang pantas buat anak-anak di Tangerang. Apa cuma pakai pangsi, baju putih itu belum ketemu, tapi ide itu sudah menempel di teman teman, termasuk pak Bupati pak Sekda,” jelas dia.

“Dalam bentuk kajian itu, selain menyarankan, mengimbau, bentuknya apa sih, harus Perbup aduan,” sementara (siswa SD-SMP) menggunakan putih merah, putih biru, dan batik khas masing-masing sekolah,” kata Saifullah. ● pp

### Kejari Tangsel Setor Rp2 Miliar Ke Kas Negara dari Duit Sitaan

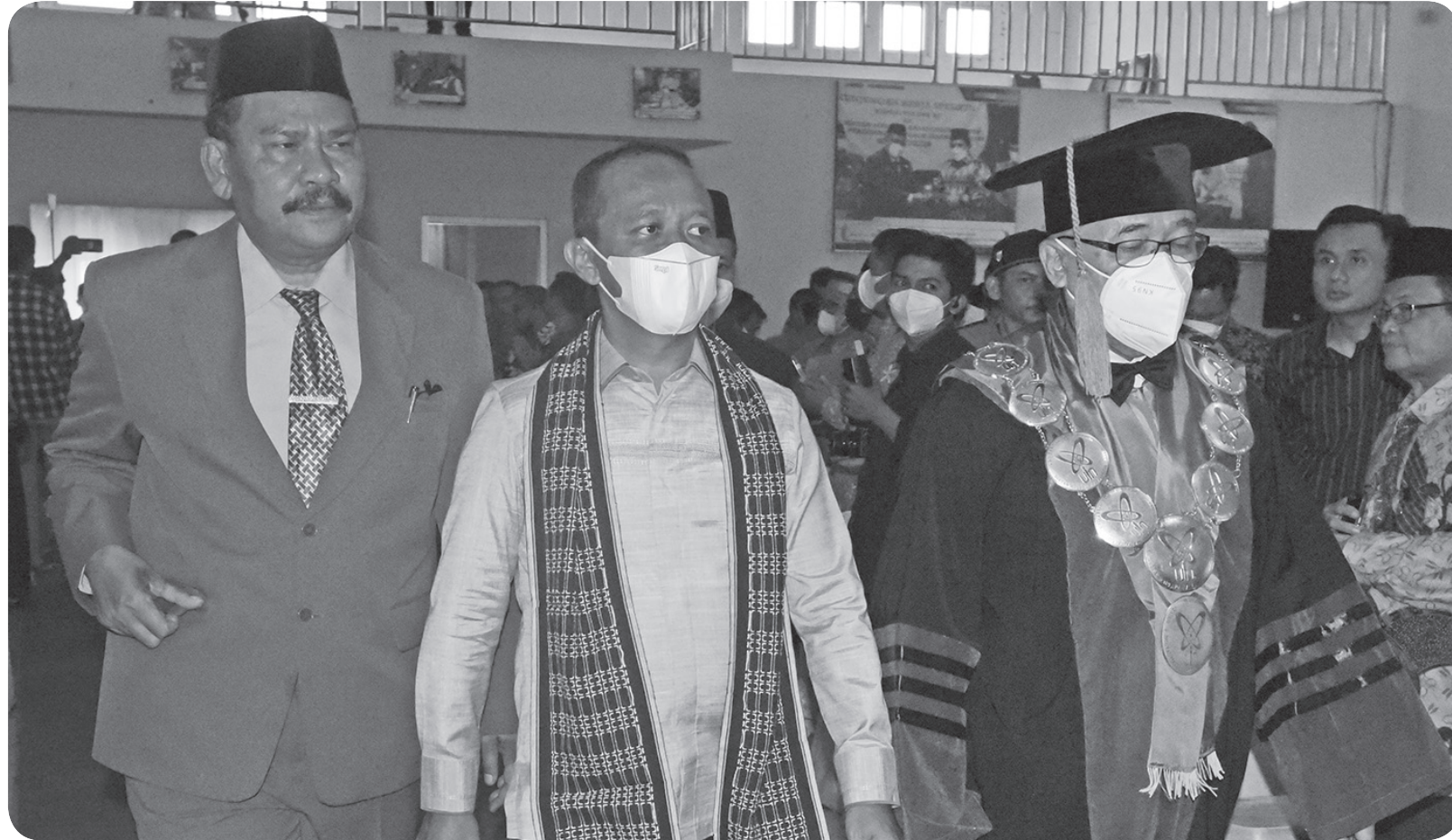
**TANGSEL (IM)-** Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel) menyita uang sekitar Rp 2 miliar hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai kasus yang telah inkrah atau berkekuatan hukum.

Dana yang disita dari beberapa penangan perkara kasus pidana umum (pidum) dan pidana khusus (pidsus) itu nantinya akan disetorkan ke kas negara. “Ini merupakan kegiatan penerimaan bukan pajak yang berasal dari penangan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan nilai Rp 2.349.058.028,” ujar Kepala Kejari Tangsel, Silpia Rosalina di kantornya, Kamis (13/10).

Silpia menjelaskan, penyitaan dilakukan terhadap dua penanganan perkara pidana khusus dan satu pidana umum. “Perkara pidsus ada dua kasus, kasus KONI dan bea cukai. Yang satu (KONI), Rp 1 miliar lebih yang bea cukai juga kurang lebih Rp 1 miliar. Kasus pidum ada Rp 233 juta, dalam hal beralihnya uang sitaan ke kas negara, akan kami setorkan,” jelas Silpia.

Adapun rinciannya yaitu, perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kejari telah melaksanakan eksekusi uang sebesar Rp 1.122.537.028.

Dalam kasus korupsi dana hibah KONI terdapat



### MENTERI INVESTASI HADIRI DIES NATALIS UIN BANTEN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahilil Lahadalia (tengah) berjalan didampingi Rektor Natalis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Prof. Dr. Wawan Wahyudin (kanan) dan Kepala Akademik UIN Banten Bazari Syam (kiri) saat akan menghadiri Dies Natalis UIN Banten ke-60 di Serang, Kamis (13/10). Bahilil Lahadalia berharap pihak perguruan tinggi lebih fokus lagi untuk mencetak lulusannya menjadi para pengusaha tangguh di berbagai bidang guna menopang kemajuan ekonomi Indonesia masa depan.

## Disnaker Tangerang Gelar Bursa Kerja dengan 1.441 Lowongan

Seluruh perusahaan yang ikut partisipasi akan melakukan pemaparan terkait profil perusahaan, lowongan yang dibuka hingga sesi tanya jawab dengan para pencari kerja. Perusahaan tersebut, di antaranya PT Mayora Indah, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Midi Utama Indonesia, RS An-Nisa dan lainnya.

**TANGERANG (IM)-** Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten pada Oktober ini menggelar

bursa kerja virtual dengan menyediakan 1.441 lowongan kerja untuk 76 formasi jabatan dari 20 perusahaan.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota Tangerang, Boyke Urif Hermawan di Tangerang, Kamis (13/10), mengatakan bursa kerja virtual pada bulan ini mengusung tema Sumpah Pemuda dan dibuka untuk umum. “Seluruh masyarakat bisa ikut serta dalam program ini, bukan hanya pemilik KTP Kota Tangerang saja,” kata Boyke dalam keterangannya.

Seluruh perusahaan yang ikut partisipasi akan melakukan pemaparan terkait profil perusahaan, lowongan yang

dibuka hingga sesi tanya jawab dengan para pencari kerja. Sejumlah perusahaan tersebut, di antaranya PT Mayora Indah, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Midi Utama Indonesia, RS An-Nisa dan lainnya. “Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan para pencari kerja, tercatat ada 88 lowongan untuk lulusan strata satu (S1), 150 lowongan untuk lulusan diploma tiga (D3), dan 1.203 lowongan untuk pencari kerja lulusan SMA/SMK,” kata Boyke.

Untuk mengikuti bursa kerja virtual, kata Boyke, pastikan pencari kerja sudah mengunduh aplikasi Tangerang

Live dan akun telah terverifikasi. Setelah itu, pencari kerja bisa mengakses menu layanan ketenagakerjaan, pilih Tangerang Cakap Kerja, lalu pilih fitur Job Fair dan lengkapi data diri.

“Untuk mengetahui daftar lowongan, pencari kerja bisa klik lowongan daftar yang tersedia. Setelah itu, masuk area bursa kerja, pilih daftar lamaran, lalu pilih lamar di area bursa kerja. Pilih lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi diri. Siapkan diri dan berkas kalian untuk bursa kerja edisi Sumpah Pemuda besok,” kata Boyke. ● pp

## Pemkab Tangerang Susun Aturan untuk Beli Kendaraan Dinas Listrik

**TANGERANG (IM)-** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang segera menyiapkan dan menyusun peraturan tentang pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas di lingkungan setempat.

Dalam pengkajian terkait dengan pengadaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik berbasis baterai tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

“Kami akan rumuskan dan laporkan kepada pimpinan supaya pengadaan kendaraan bermotor/mobil listrik ini bisa dihidirkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (13/10).

Dalam inpres itu diatur, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. “Sekarang kami sudah mendapatkan surat/inpres itu, insya Allah, pada tahun 2023 akan kami siapkan anggaran,” kata Maesyal.

Pemkab Tangerang, kata dia, kini sedang menyiapkan dana dalam pengadaan kendaraan listrik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. “Kami juga akan lihat kesiapan/ketersediaan kendaraan listrik itu apa sudah siap pada tahun 2023. Maka, kami akan mengikuti anjuran pemerintah pusat yang akan dilaksanakan Pak Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Maesyal.

Atas kebijakan pemerintah pusat tentang penyediaan kendaraan listrik tersebut, dia berharap dalam waktu dekat ini sudah tersedia dalam e-katalog agar pemerintah daerah dapat segera mengeksekusinya. “Mudah-mudahan ke depan muncul di e-katalog supaya kami bisa menindaklanjuti itu,” ucap Maesyal. ● pp

## 54 Kendaraan Barang dan Umum Terjaring Operasi KTL di Tangerang

**TANGERANG (IM)-** Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang melakukan Operasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Raya Penda Tigaraksa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Operasi itu bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan teratur.

Operasi kawasan tertib lalu lintas tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 551/K6P30-HUK/2011 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Tangerang.

“Terdapat 54 kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Kendaraan tersebut di antaranya pajak kendaraan telah habis masa berlakunya, beberapa kendaraan tidak dapat menunjukkan kartu uji kendaraan dan overload,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Tangerang, Sukri, Kamis (13/10).

Untuk kelengkapan STNK dan SIM pengemudi, Pemkab Tangerang telah menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penindakan

lebih lanjut.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai dari Senin 10 Oktober sampai Jumat 14 Oktober. Selain itu operasi ini juga merupakan bagian dari operasi gabungan tahunan yang melibatkan TNI/Polri, Dishub serta Samsat Balaraja.

Pihaknya juga sering memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Sementara itu, Kalbinkov Satlantas Tangerang, Gusman-to menjelaskan pihaknya ikut mendampingi kegiatan pemerintah daerah yaitu operasi penertiban angkutan lalu lintas untuk penertiban angkutan dan barang bersama dengan kegiatan Operasi Zebra Maung 2022.

“Kita bergabung, kalau Dishub terkait dengan penertiban angkutan dan barang kalo kita lebih ke lalu lintas, kami berikan imbauan maupun secara teguran dan tertulis kepada para pelanggan yang tidak membawa surat-surat dan tidak memakai helm,” pungkasnya. ● pp

## HUT Ke - 390, Pemkab Tangerang Peroleh Predikat UHC

**TANGERANG (IM)-** Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Atas pencapaian tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan perayaan hari jadi Ke-390 Kabupaten Tangerang.

Penyerahan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli di GSG Puspemkab Tangerang ketika mengikuti rangkaian acara HUT Kab. Tangerang yang digelar di GSG, seperti sunatan masal, donor darah dan pemberian penghargaan lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati mengungkapkan rasa syukur yang mendalam sekaligus mengucapkan terima kasih bahwasannya di hari jadi ke-390 Kabupaten tahun ini, Kabupaten Tangerang masih bisa terus konsisten menorehkan prestasi sebagai satu bukti bahwa kami terus mengabdikan, mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin sejahtera untuk masyarakatnya.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan atas capaian UHC dari BPJS Ketenagakerjaan. Semoga momentum ini dapat dijadikan sebagai pelepas semangat yang nyata untuk bersama-sama kita satukan komitmen untuk mengabdikan dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas sebagai seorang abdi negara untuk masyarakat kita,” ungkap Wakil.

Selanjutnya Wabup H. Mad Romli mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tigaraksa yang telah bekerja sama sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang bisa terjamin ke dalam Program JKN.

“Capaian UHC Kabupaten Tangerang merupakan hasil kerja keras kita bersama selama kurang lebih satu tahun terakhir ini sehingga bisa mencapai kepesertaan JKN-KIS sekitar 95,74% dari seluruh penduduk Kabupaten Tangerang. Kita harus terus semangat untuk mencapai target UHC selanjutnya UHC di 98% pada tahun 2024 sesuai dengan RJPMN, jelasnya.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tigaraksa, Sudyanti mengatakan UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Ke-

sehatan. Menurut Sudyanti, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam memastikan minimal 95% penduduknya telah mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau diaftarkan menjadi peserta JKN.

“Melalui UHC diharapkan akan semakin banyak yakni penduduk yang dapat terjamin kesehatannya,” ujar Sudyanti.

Sudyanti menambahkan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Provinsi Banten. Dia juga mengungkapkan sekitar 95,74% penduduk Kab. Tangerang telah terdaftar dalam program JKN.

“Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang semester I tahun 2022 sebanyak 3.216.465 jiwa. Per 1 Oktober 2022, prosentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar dalam Program JKN sebesar 95,74% atau sebanyak 3.079.285 jiwa,” ungkapnya.

Sesuai acara tersebut, Wakil Bupati Tangerang bersama jajaran Forkopimda dan Sekda meninjau kegiatan sunatan masal, dan donor darah yang juga digelar di GSG. ● joh



Pemkab Tangerang resmi memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC), penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli di GSG Puspemkab Tangerang.